

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Di lingkungan masyarakat pembentukan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh sekitarnya, besar kecilnya bentuk perilaku seseorang sangat beragam yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar sebab masyarakat mempunyai kontribusi yang besar sebagai aspek sekunder dalam pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang di masyarakat. Perilaku yang didapatkan tersebut perilaku yang sesuai dengan norma, baik perilaku yang menyimpang dari segi nilai dan norma sesuai dengan pengaruh yang diterima seseorang tersebut, masyarakat dalam berperilaku mempunyai batasan-batasan dalam melakukan segala sesuatunya dan untuk mengatur segala sesuatu yang dialami di dalam masyarakat juga dibutuhkan kontrol sosial. Teori tentang kontrol sosial dapat diringkas sebagai pengendalian diri, kunci kearah pembelajaran pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi untuk mengembangkan pengendalian diri dengan jalan mengawasi dan menghukum tindakan yang menyimpang. Kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” disebut kontrol sosial bersifat preventif, sedangkan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi disebut kontrol sosial yang bersifat refresif kontrol sosial ini mempunyai efek membendung atau mengembalikan para warga masyarakat dari niatnya melanggar norma atau perilaku yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku. Kontrol sosial akan membantu keberadaan masyarakat dalam

bertindak dan mengetahui batasan-batasan yang dilarang untuk melihat sejauh mana mereka bertindak. Dalam hal ini, subjek serta objek di dalam kontrol sosial adalah masyarakat, dimana suatu aturan dan sanksi yang menentukan serta menjalankan adalah masyarakat. Dan yang menjadi aspek sebagai pengendali sekaligus yang di kendalikan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, pastinya nilai, norma terdapat aturan yang diberlakukan. Dengan dibentuknya tujuan ini agar mencapai keteraturan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Dilain sisi, dengan adanya pengendalian sosial tujuannya adalah guna untuk meminimalisir adanya perilaku yang menyimpang atau yang tidak diinginkan.<sup>1</sup>

Terdapat upaya pengendalian sosial dalam pencegahan perilaku seks bebas atau menyimpang dan sesuai berdasarkan teori upaya pengendalian sosial yaitu terdiri dari mempertebal keyakinan masyarakat tentang nilai dan norma, memberikan imbalan kepada warga masyarakat dalam melaksanakan pengendalian sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Di sekitar lingkungan tempat kita tinggal kerap kali terlihat perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok, dengan melakukan kegiatan diluar aturan atau nilai dan norma yang berlaku tampak disekeliling masyarakat sekitar perilaku menyimpang, yang disebabkan adanya sikap masyarakat lari dari aturan adat dan kebiasaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyimpangan sosial bisa dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang jika penyimpangan tersebut dilakukan oleh suatu kelompok dan bukan lagi dilakukan

---

<sup>1</sup> Sulastri Devi, "Pengawasan Sosial Terhadap Remaja Dikelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Pada Tindak Kriminal)", *Jom Fisip*, Vol.5(2018), 6.

secara individu. Adapun beragam motif dari individu ataupun kelompok untuk melakukan suatu penyimpangan. Adanya dampak perilaku menyimpang itu sendiri akan dirasakan oleh dirinya dan orang lain, dalam hal ini perilaku menyimpang bisa dikatakan masalah bersama dalam lingkungan masyarakat. Kerap kali dilingkungan masyarakat banyak yang tidak menaati aturan yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada salah satu contoh dari perilaku menyimpang yang kerap tampak di sekeliling masyarakat yakni praktik prostitusi.<sup>2</sup>

Ada beberapa dilingkungan masyarakat menyalahi aturan dan hukum yang ada misalnya kegiatan prostitusi atau tuna susila kerap kali dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma, dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan dapat memanimalisir tempat pelaksanaan kegiatan prostitusi karena barang siapa yang memberikan fasilitas asusila sudah termasuk dalam pelanggaran atas ketertiban umum. Tentu mereka yang melakukan dan memberikan fasilitas bagi praktik asusila atau praktik prostitusi merupakan pelaku penyimpangan karena melanggar aturan mengenai ketertiban umum semakin lama lokalisasi Tambi semakin berkembang hingga pada tahun 1989 keluar peraturan daerah bahwasanya lokalisasi ditutup, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 1999 mengenai larangan bangunan atau rumah tinggal difungsikan sebagai tempat asusila dan sebagai tempat pemikatan melakukan tindak asusila, kedua yaitu Undang-Undang perdagangan manusia untuk menutup Eks-Lokalisasi Tambi. Kegiatan prostitusi pun dianggap sebagai salah satu bentuk kriminalitas di mata hukum. Selain itu,

---

<sup>2</sup> Hetty Krisnani, "Pengendalian Sosial Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Akhir Di Desa Cikeruh Kecamatan Jati Nangor Kabupaten Sumedang", *Social work jurnal*, Vol. 8, No.1 (2014),28-29.

upaya lain yang dapat dilakukan dalam meminimalisir keberadaan praktik prostitusi tidak hanya bertitik tolak pada aturan pemerintah saja, namun peran masyarakat sebagai pengendali sosial pun mesti di perhatikan. Seluruh anggota di masyarakat harus mengambil alih atau turut serta dalam pemberantasan penyakit masyarakat itu sendiri. Mengoptimalkan fungsi dari masyarakat sebagai agen pengendali sosial yang menciptakan, menjalankan serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya upaya masyarakat yang turut serta dalam pemberantasan perilaku menyimpang khususnya kegiatan prostitusi, diharapkan masalah-masalah di masyarakat akan berkurang atau terminimalisir.<sup>3</sup>

Akan tetapi dengan berjalannya waktu pengurus lokalisasi tambis semakin lama semakin melihat dan merasakan imbasnya penutupan lokasi tersebut, mulai dari segi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan setelah terjadinya penutupan lokasi masih ada kegiatan di dalam lokasi tersebut, mereka memperjuangkan lokasi Tambis agar diberi izin oleh pemerintah daerah hingga pada akhirnya lokasi Tambis resmi dibuka kembali dengan beberapa konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya yaitu tidak boleh menambah rumah lagi.

Disini peneliti menemukan suatu kenyataan masyarakat dimana dalam menyikapi adanya perilaku yang menyimpang, kemudian menghasilkan sikap para tokoh agama dalam menilai, norma, aturan, kebiasaan itu sendiri. Pengertian sikap adalah perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, sikap bersifat evaluatif

---

<sup>3</sup> Melinda Arsanti, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.5, No.3 (2012), 58-59.

dan berakar pada nilai yang dianut dan terbentuk dalam kaitannya dalam suatu objek. Sikap para tokoh agama terhadap kegiatan prostitusi dianggap sebagai suatu masalah dalam penelitian ini, terutama sikap para tokoh agama dalam menangani kasus kegiatan prostitusi. Prostitusi adalah perilaku yang menyimpang dalam lingkungan masyarakat desa Tambi yang dijadikan sebagai tempat penelitian peneliti, kegiatan prostitusi ini kebanyakan dilakukan berlangsung pada malam hari. Hal tersebut dikarenakan pelaku prostitusi merupakan wanita yang menjual kecantikan dan keindahan tubuh yang dibalut dengan pakaian yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat desa Tambi pada umumnya. Menjual tubuh dan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan hanya demi memperoleh upah, mengutamakan urusan duniawi dan mengesampingkan moralitas.<sup>4</sup>

Tempat kegiatan prostitusi merupakan suatu kasus yang sangat disorot di tempat-tempat lain untuk diberantas, karena dianggap mengganggu ketertiban umum, melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dianut bagi salah satu agama yang mendominasi di daerahnya. Dimana berdasarkan hasil penelitian, hampir 90% masyarakat desa Tambi kecamatan kandangan beragama Islam. Tempat kegiatan prostitusi tersebut berbeda dengan tempat lokalisasi pada umumnya yang memang dikhususkan bagi Pekerja Seks Komersial, keberadaan praktik prostitusi ini berada di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat.

Dalam agama Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum islam tentang perzinahan jauh berbeda dengan konsep hukum

---

<sup>4</sup> Veronica Amelia Maria Pantouw, "Sikap Warga Putat Mengenai City Branding Kota Surabaya Melalui Program Revitalasi Eks Loakalisasi Dolly", *Jurnal Komunikatif*, Vol.7, No.1 (2010), 5-6.

konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk ke dalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya baik itu dalam tujuan komersial baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan<sup>5</sup>.

Penelitian ini dianggap perlu karena alasan yang telah diutarakan sebelumnya, terutama yang mengundang ketertarikan peneliti adalah untuk lebih mengetahui bagaimana sikap para tokoh agama terhadap adanya praktek prostitusi dan tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai pengendali sosial untuk memberantas keberadaan praktek prostitusi sementara diketahui jelas lokasi yang digunakan untuk kegiatan prostitusi tersebut mestinya mengundang banyak penolakan, karena berada di tengah pemukiman masyarakat yang berbeda dengan lokalisasi pada umumnya, serta secara langsung akan mengganggu ketertiban umum prostitusi berkembang karena terciptanya mekanisme pasar yang menjadikan pelacuran sebagai suatu bisnis seks yang sangat menguntungkan akhirnya asumsi dasar prostitusi dan ekonomi ibarat mata uang dalam banyak argumen keberadaanya. Ditambah masyarakat Desa Tambi pada umumnya

---

<sup>5</sup> Heni Hendrawati, "Asas Asas Dan Upaya Mencegeah Kemungkaran Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *jurnal fakultas ilmu kesehatan*, Vol 2 (2013), 29.

beragama Muslim dan para tokoh ustadz yang seharusnya melarang adanya perzinahan atau kegiatan prostitusi.<sup>6</sup>

Berdasarkan konteks penelitian di atas memberikan inspirasi bagi peneliti untuk lebih mendalam mengetahui mengenai sikap yang ada pada para tokoh agama Desa Tambi dengan adanya praktek prostitusi di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Sikap Para Tokoh Agama Terhadap Praktek Prostitusi Di Eks Lokalisasi Desa Tambi Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri** ” Informasi yang digali dalam penelitian ini adalah para tokoh agama Desa Tambi yang dianggap berpengaruh di lingkungannya.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sikap tokoh agama terhadap praktek prostitusi di eks lokalisasi Tambi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan para tokoh agama untuk mengatasi adanya praktek prostitusi tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sikap tokoh agama terhadap praktek prostitusi di eks lokalisasi Tambi
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan para tokoh agama untuk mengatasi adanya praktek prostitusi di eks lokalisasi Tambi

---

<sup>6</sup> Nasrullah Khumaerah, “Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Quran”, *jurnal komunikasi dan penyiaran islam*, Vol.3, No.1 (2017), 63.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun pada dasarnya setiap penelitian memiliki manfaat bagi peneliti dan bagi pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat membantu untuk menambah pustaka ilmu pengetahuan semua kalangan khususnya psikologi sosial dalam menghadapi permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dan penelitian ini juga dapat dijadikan literatur sebagai rujukan penelitian yang akan datang, menambah dan memperluas pengetahuan khususnya mengenai sikap masyarakat terhadap kegiatan prostitusi.

##### 2. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memahami sebuah permasalahan sosial yang ditinjau dari ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan refleksi sikap masyarakat terhadap adanya kegiatan prostitusi, dan bagi kalangan masyarakat umum bisa sebagai tambahan wacana.

#### **E. Telaah Pustaka**

Karya ilmiah yang memusatkan kajiannya tentang sikap dan kegiatan prostitusi, baik berupa buku skripsi atau jurnal sudah cukup banyak , antara lain :

1. Penelitian yang berjudul“ Persepsi tokoh masyarakat terhadap aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi rawa laut panjang



selatan bandar lampung“ Oleh M. Sidi Ritaudin dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai judul ini terdapat persepsi positif dan persepsi negatif dari tokoh masyarakat terhadap mantan PSK di eks lokasi terdapat persepsi positif yaitu menganggap baik dan memberikan nilai yang positif terhadap mereka dan pemerintah memberikan program penyuluhan dan pelatihan agar mereka bisa meninggalkan profesi mereka sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan persepsi negatif, tidak sedikit masyarakat justru mencibir dan melecehkan mereka yang mereka katakan bahwa menikmati profesi mereka sebagai pelacur mencari uang dengan mudah tanpa bekerja keras dan memutar otak hanya mengandalkan tubuh saja.

Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk melihat sikap masyarakat terhadap kegiatan prostitusi di eks lokasi Tambi dengan melihat penilaian masyarakat dengan adanya kegiatan prostitusi yang berada di tengah-tengah masyarakat atau penduduk desa.

2. Penelitian yang berjudul “Permisivisme masyarakat terhadap praktik prostitusi di kota bandung“, Oleh Dasim Budiansyah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil dari latar belakang masalah tersebut menghasilkan pandangan dan sikap masyarakat dimana masyarakat mengetahui bahwa praktik prostitusi adalah perilaku yang menyimpang, namun ditunjukkan lebih kepada sikap acuh atau memilih diam dengan adanya praktik tersebut dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitarnya sekalipun itu menyimpang, sikap permisif terhadap praktik prostitusi berlangsung

sehubungan dengan melemahnya kontrol sosial dari para agen pengendali sosial.

Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk melihat sikap masyarakat terhadap kegiatan prostitusi di eks lokalisasi Tambi yang dimana masyarakat dalam menyikapi adanya kegiatan tersebut.

3. Penelitian yang berjudul “Prostitusi di obyek wisata gunung kemukus dan implikasinya terhadap moralitas remaja (studi kasus di obyek wisata gunung kemukus, desa pendem, kecamatan sumberlawang, kabupaten sragen)” Oleh Geri Pradita dari UNS (Sebelas Maret University). Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata gunung kemukus menunjukkan adanya berlangsung praktik prostitusi yang dilatar belakangi dengan berkembangnya mitos prosesi ziarah kubur demi terkabulnya suatu permintaan yang diharuskan untuk melakukan hubungan suami istri diluar ikatan pernikahan dan pemerintah membiarkan adanya penyimpangan ini.

Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk melihat sikap masyarakat terhadap kegiatan prostitusi di eks lokalisasi Tambi dengan melihat penilaian masyarakat dengan adanya kegiatan prostitusi yang berada di tengah-tengah masyarakat atau penduduk desa.

4. Penelitian yang berjudul “Persepsi masyarakat terhadap profesi PSK(Studi pada masyarakat kelurahan 24 Ilir Palembang)” Oleh Sipit Agustina dari UIN Raden Fatah Palembang. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap profesi PSK bahwasannya

semua masyarakat menganggap profesi itu adalah pekerjaan yang hina yang dianggap sebagai sampah masyarakat yang menimbulkan dampak negatif yaitu memperluas dan menimbulkan penyakit kulit dan kelamin seperti sypilis, gonore, HIV/AIDS, merusak sendi-sendi keluarga dan merusak sendi-sendi moral.

Sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan ini bertujuan untuk melihat sikap masyarakat terhadap kegiatan prostitusi di eks lokalisasi Tambi dengan melihat penilaian masyarakat dengan adanya kegiatan prostitusi yang berada di tengah-tengan masyarakat atau penduduk desa.